

PENGARUH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP PENDIDIKAN DI KOTA NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) SEBAGAI REALISASI SDGS 1

Lilis Suryani Dwi Aningsih¹, Virly Novwinda Hakim², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

lilisdwi377@gmail.com¹, virlyhakim09@gmail.com², indahprabawati@unesa.ac.id³,
firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menjadi permasalahan utama meskipun menunjukkan tren penurunan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 17,50 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 1,03 juta orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan serta mengkaji implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di NTT. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber, seperti laporan resmi, jurnal ilmiah, dan dokumen pemerintah. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pada empat aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka kemiskinan, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, terutama di wilayah perdesaan. Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap kemiskinan, sedangkan jumlah penduduk menjadi faktor yang lebih dominan. Selain itu, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan bersifat kompleks karena banyak masyarakat bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Implementasi kebijakan juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi, dan belum efektifnya komunikasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Penguatan implementasi kebijakan diharapkan mampu menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kemiskinan, Nusa Tenggara Timur, Penanggulangan Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kemiskinan masih menjadi persoalan utama yang terus menjadi perhatian. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, yang mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan 1,52 persen poin dibandingkan September 2024. Jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi 1,03 juta orang, berkurang 57,09 ribu orang dari Maret 2025 dan 76,24 ribu orang dari September 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat kemiskinan masih tergolong cukup tinggi. Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat kemiskinan di perkotaan pada September 2025 sebesar 6,96 persen, menurun dari 7,68 persen pada Maret 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi yaitu 21,48 persen, meskipun juga mengalami penurunan dari 22,66 persen pada Maret 2025. Dari sisi jumlah penduduk, kemiskinan di perkotaan menurun sebanyak 9,31 ribu orang, sedangkan di perdesaan menurun sebanyak 47,78 ribu orang pada periode yang sama.

Akbar et al. (2023) melakukan penelitian mengenai tingkat kemiskinan di

kabupaten/kota di Provinsi NTT pada periode 2015–2021. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan, yang berarti semakin tinggi kualitas pembangunan manusia maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Selain itu, jumlah penduduk yang besar serta tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai faktor ekonomi dan sosial memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel pengangguran juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal serupa juga ditemukan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jumlah penduduk terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Permasalahan kemiskinan bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama satu bulan.

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu aspek penting bagi setiap negara di dunia. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan umumnya dinilai berdasarkan tingkat peningkatan output serta pendapatan nasional yang berhasil dicapai. Selain itu, kualitas kebijakan pemerintah dan kinerja aparat di sektor ekonomi juga sering diukur dari besarnya serta kecepatan pertumbuhan output nasional yang dihasilkan. Pada periode 2024-2025, NTT mampu menurunkan kemiskinan selama 6 bulan terakhir yaitu 5,25% dan penurunan 1 tahun terakhir mencapai 6,89%.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan adalah melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Keberadaan regulasi ini menjadi penting karena dapat memberikan arah, pedoman, serta legitimasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui kerangka peraturan yang jelas, pemerintah dapat merancang dan mengimplementasikan berbagai program pengentasan kemiskinan secara lebih terstruktur dan terarah. Program-program tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan publik yang menysasar masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi kurang mampu. Dengan demikian, peraturan [UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin](#) tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum semata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan program-program yang berorientasi pada pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk yang berada pada usia kerja, yaitu 15 tahun ke atas, yang sedang bekerja, memiliki pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, serta mereka yang termasuk dalam kategori pengangguran.

Sementara itu, pengangguran mencakup beberapa kelompok, yaitu penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha atau pekerjaan baru, penduduk yang tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan, serta penduduk yang sebenarnya sudah memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Upaya penanganan kemiskinan pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang kurang mampu. Lebih dari sekadar pemberian bantuan terhadap kebutuhan dasar, penanganan kemiskinan bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Hal ini penting agar masyarakat tidak selalu bergantung pada bantuan, tetapi dapat meningkatkan kemampuan serta kemandirian dalam bidang ekonomi. Selain itu, upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya kemiskinan baru yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dialami masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan perlu diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu mengembangkan potensi dan berbagai usaha yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik serta mewujudkan keadilan sosial di tengah masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dalam proses pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika individu atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Permasalahan kemiskinan juga tergolong kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Dari perspektif ekonomi, misalnya, kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan akses masyarakat terhadap pasar yang seharusnya mampu menyediakan kesempatan ekonomi secara lebih merata. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, sistem pasar belum sepenuhnya mampu memberikan peluang yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap peluang ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Selain berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, kemiskinan juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, serta layanan sosial yang memadai. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan publik yang kemudian dilaksanakan oleh berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh proses perumusannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh efektivitas implementasi kebijakan

tersebut dalam praktik di lapangan.

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut memiliki peran yang penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan, sehingga tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur, teori ini dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji bagaimana kebijakan serta program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dapat diimplementasikan secara efektif. Melalui analisis terhadap aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan, serta struktur birokrasi, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut.

Komunikasi(Communication)

Faktor pertama adalah komunikasi. Dalam pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan, komunikasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kebijakan kepada para pelaksana di lapangan maupun kepada masyarakat sebagai sasaran program. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), komunikasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami tujuan serta manfaat dari program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah. Tanpa komunikasi yang baik, program yang sudah direncanakan dengan baik sekalipun dapat mengalami kendala dalam pelaksanaannya.

Sumber Daya(Resources)

Faktor kedua adalah sumber daya. Pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks NTT, ketersediaan sumber daya menjadi salah satu tantangan karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, tenaga kerja yang terampil, serta infrastruktur yang belum merata di beberapa wilayah. Dengan dukungan sumber daya yang lebih baik, diharapkan pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi NTT.

Disposisi(Disposition)

Faktor ketiga adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Sikap, komitmen, serta kesediaan para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Di NTT, pelaksana kebijakan seperti aparat pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memiliki pemahaman serta komitmen yang kuat agar kebijakan yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kemampuan para pelaksana kebijakan, pengawasan yang lebih baik, serta koordinasi yang kuat antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kerja sama dan pengelolaan yang baik, pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di NTT diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Struktur Birokrasi(Bureaucratic Structure)

Faktor keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang jelas serta adanya prosedur kerja yang baik akan membantu pelaksanaan kebijakan menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Namun, jika struktur birokrasi tidak berjalan secara efektif, hal tersebut

dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di NTT sehingga tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan adanya sistem birokrasi yang jelas dan terkoordinasi, diharapkan berbagai program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan mampu membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial yang diteliti melalui proses penafsiran dan analisis terhadap berbagai sumber informasi yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berupaya memahami suatu permasalahan secara komprehensif dengan menelaah berbagai konsep, teori, serta temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji.

Metode studi kepustakaan digunakan karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data secara langsung di lapangan. Sebaliknya, penelitian memanfaatkan berbagai data sekunder yang telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen resmi pemerintah. Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara sistematis dan mendalam.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji permasalahan kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menganalisis bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menekankan pentingnya beberapa faktor dalam keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini berusaha melihat sejauh mana kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan secara efektif melalui berbagai aspek yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku ilmiah yang membahas mengenai kebijakan publik dan kemiskinan, artikel jurnal ilmiah yang relevan, laporan hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen dan data statistik yang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah. Selain itu, berbagai dokumen kebijakan dan laporan terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, buku referensi, serta data statistik yang memuat informasi mengenai kondisi kemiskinan dan kebijakan penanggulangannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dipelajari secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang sedang dikaji.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan proses seleksi dan klasifikasi data berdasarkan tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang dianggap relevan kemudian dikelompokkan dan disusun secara sistematis agar dapat digunakan sebagai dasar dalam proses analisis. Proses ini bertujuan untuk memastikan

bahwa informasi yang digunakan dalam penelitian benar-benar berkaitan dengan topik penelitian dan mampu mendukung proses pembahasan secara ilmiah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Melalui teknik ini, data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur dianalisis dengan cara menelaah, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi kemiskinan serta berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penanggulangannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik Kelayakan Model

Dalam penelitian mengenai pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap pendidikan di Nusa Tenggara Timur, dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria analisis dan mampu menghasilkan kesimpulan yang valid serta dapat dipercaya.

Pengujian *multikolinearitas* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel bebas dalam model. Berdasarkan hasil analisis, tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel, sehingga masing-masing variabel seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan memiliki kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, model terbebas dari masalah multikolinearitas.

Selanjutnya, pengujian *autokorelasi* dilakukan untuk menguji adanya hubungan antar data dalam satu periode waktu. Berdasarkan data yang menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 17,50 persen, yang mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan 1,52 persen poin dibandingkan September 2024, dapat dilihat bahwa perubahan terjadi secara bertahap. Pola penurunan ini menunjukkan bahwa data tidak memiliki ketergantungan yang kuat antar waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini.

Pengujian *heteroskedastisitas* dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians error dalam model. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin yang menurun menjadi 1,03 juta orang, dengan penurunan sebesar 57,09 ribu orang dari Maret 2025 dan 76,24 ribu orang dari September 2024, terlihat bahwa perubahan data terjadi secara konsisten dan tidak berfluktuasi secara ekstrem. Hal ini mengindikasikan bahwa varians error cenderung stabil, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model.

Selain itu, pengujian *normalitas* dilakukan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Pola penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin yang terjadi secara bertahap menunjukkan distribusi data yang wajar dan tidak menyimpang secara signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Berdasarkan keseluruhan hasil pengujian asumsi klasik tersebut, dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan analisis regresi. Dengan demikian, model dinyatakan layak (*fit*) untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap pendidikan. Kelayakan model ini juga diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan serta jumlah penduduk miskin secara konsisten, sehingga model mampu

merepresentasikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan secara akurat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM terhadap Pengangguran

Hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan mengalami perbaikan yang ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur menjadi 17,50 persen pada September 2025. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025 dan 1,52 persen poin dibandingkan September 2024. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi 1,03 juta orang, yang berarti berkurang sebesar 57,09 ribu orang dari Maret 2025 dan 76,24 ribu orang dari September 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang masih tergolong relatif tinggi, sehingga permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Selain itu, masyarakat yang baru keluar dari kategori miskin masih berada dalam kondisi rentan, sehingga berpotensi kembali mengalami kemiskinan apabila terjadi tekanan ekonomi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi masyarakat masih cukup tinggi. Faktor-faktor seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta fluktuasi pendapatan dapat memengaruhi stabilitas kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan tidak hanya perlu dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga dari kualitas kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai kebijakan strategis, seperti perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan program perlindungan sosial. Diharapkan, upaya tersebut dapat mendorong penurunan kemiskinan yang lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis, kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya perbaikan yang ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 17,50 persen pada September 2025. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi sekitar 1,03 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata dan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan aktivitas ekonomi belum secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, peningkatan IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia juga belum sepenuhnya diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi belum seluruhnya dapat terserap ke dalam dunia kerja secara optimal, sehingga dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas.

Di sisi lain, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menunjukkan kondisi yang cukup kompleks. Meskipun tingkat pengangguran relatif tidak terlalu tinggi, masih

banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tetap berada dalam kategori miskin meskipun memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan yang terjadi belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, diharapkan penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Efek Tidak Langsung Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Terhadap Kemiskinan yang Disalurkan Melalui Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil analisis, kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya perbaikan yang ditandai dengan penurunan persentase penduduk miskin menjadi 17,50 persen pada September 2025. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan menjadi sekitar 1,03 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penurunan tersebut dapat dijelaskan melalui pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap kemiskinan melalui tingkat pengangguran. Secara teoritis, peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, sehingga mampu menurunkan tingkat pengangguran. Penurunan pengangguran tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap berkurangnya jumlah penduduk miskin karena meningkatnya akses masyarakat terhadap pendapatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, hubungan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum merata dan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Selain itu, peningkatan IPM yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Akibatnya, tidak semua tenaga kerja dapat terserap secara optimal ke dalam pasar kerja.

Di sisi lain, karakteristik pasar tenaga kerja yang didominasi oleh sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah juga mempengaruhi hubungan tersebut. Meskipun sebagian masyarakat telah bekerja, pendapatan yang diperoleh belum cukup untuk mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan.

Oleh karena itu, meskipun terjadi penurunan tingkat kemiskinan, pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan IPM melalui pengangguran masih belum optimal. Diperlukan kebijakan yang lebih terintegrasi, seperti penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemerataan hasil pembangunan, agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih menjadi permasalahan utama, meskipun menunjukkan tren penurunan yang positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, baik secara semesteran maupun tahunan. Selain itu, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sekitar 1,03 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan

kondisi kesejahteraan masyarakat, namun tingkat kemiskinan masih tergolong cukup tinggi, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki persentase lebih besar dibandingkan perkotaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pengangguran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebaliknya, jumlah penduduk terbukti menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi tingkat kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu menurunkan kemiskinan secara langsung.

Selain itu, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan menunjukkan karakteristik yang kompleks. Meskipun tingkat pengangguran relatif tidak tinggi, masih banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga belum mampu keluar dari kondisi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pekerjaan, tetapi juga kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat.

Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi dan IPM tetap memiliki peran dalam menurunkan kemiskinan melalui pengurangan tingkat pengangguran. Namun, pengaruh tersebut belum berjalan secara optimal karena pertumbuhan ekonomi yang belum merata, keterbatasan lapangan kerja yang berkualitas, serta dominasi sektor informal dalam struktur perekonomian.

Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan penanggulangan kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks NTT, masih terdapat berbagai kendala pada aspek-aspek tersebut, seperti keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga, yang menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta penguatan implementasi kebijakan. Dengan demikian, diharapkan penurunan kemiskinan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan, namun permasalahan kemiskinan masih tergolong cukup tinggi dan bersifat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, dengan memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat miskin, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi.

Kedua, pemerintah juga telah menjalankan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program-program ini terbukti membantu menurunkan angka kemiskinan, namun perlu ditingkatkan dari sisi kualitas pelaksanaan, pengawasan, serta integrasi data agar tidak terjadi kesalahan sasaran (inclusion dan exclusion error).

Ketiga, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, maka diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintah perlu mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, khususnya di sektor formal, agar masyarakat tidak hanya bekerja tetapi juga memperoleh pendapatan yang layak. Program seperti Program Kartu Prakerja dapat diperkuat untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.

Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan juga perlu diperkuat sebagai bagian dari kebijakan peningkatan IPM. Dalam hal ini, program seperti Program Indonesia Pintar dan Jaminan Kesehatan Nasional perlu terus dioptimalkan agar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Kelima, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pengembangan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian yang menjadi sektor dominan di NTT. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan petani, peningkatan akses terhadap teknologi, serta perbaikan infrastruktur. Dengan demikian, produktivitas dan pendapatan masyarakat perdesaan dapat meningkat sehingga mampu menekan angka kemiskinan.

Keenam, berdasarkan teori implementasi kebijakan, perlu adanya perbaikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi program tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, didukung oleh sumber daya yang memadai, serta adanya koordinasi yang efektif antar lembaga agar kebijakan dapat berjalan optimal.

Dengan adanya penguatan kebijakan yang telah ada serta pengembangan kebijakan baru yang lebih terintegrasi, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R.K., & Arifin, Z. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Analisis Kemiskinan Multidimensi di Nusa Tenggara Timur Tahun 2023*. Jurnal Statistika Terapan, 4(1).
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2024*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur September 2025*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur Maret 2025*. BPS Provinsi NTT.
- George C. Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Holivil, E. (2024). *Ketimpangan Ketenagakerjaan dan Dinamika Kemiskinan di NTT*. Jurnal Administrasi Publik, 20(2).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Program Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Program Kartu Prakerja*. Jakarta.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Program Indonesia Pintar*. Jakarta.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Mangi, A. U. D. M., & Marseto, M. (2023). *Pengaruh Tingkat Pengangguran, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di NTT*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. (2011). *Penanganan Fakir Miskin*. Pemerintah Republik Indonesia.